

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan pemilihan kepala daerah adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga KPU inilah yang bertanggung jawab atas seluruh aspek yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu tersebut. KPU sebagai lembaga negara penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri ini telah diatur dalam UUD 1945 pasal 22 e ayat (5). Hal ini juga diatur pada pasal 1 angka 6 Undang- Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Firmanzah, 2010; 55).

Terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, salah satu komponen penyelenggara pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah diatur sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Peran PPK pada pelaksanaan Pemilu sangat menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan Pemilu atau dapat dikatakan Pemilih Tingkat Kecamatan (PPK) sebagai suatu “ujung tombak” pelaksanaan Pemilu.

Selain sebagai perwujudan bentuk pemerintahan yang demokratis, terbentuknya pemerintah daerah yang sah, kooperatif dan bijaksana, serta benar-benar sanggup untuk menjalankan pemerintahan merupakan tujuan dari pemerintah pusat dalam menetapkan mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian, diharapkan dengan manajemen

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang baik, dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah yang baik pula.

Model struktur vertikal dalam pelaksanaan Pemilu telah dirancang oleh Pemerintah Indonesia pasca Pemerintahan Rezim Orde Baru dengan tujuan supaya pelaksanaan pemilu dapat terkondisikan, sama, dan tidak banyak pihak yang dirugikan baik dalam pemilihan presiden, pemilihan kepada daerah, maupun anggota legislatif.

Seleksi pembentukannya dilakukan secara ketat dan berjenjang dan masyarakat berhak memberikan penilaian. Pengisi jabatan-jabatan pelaksana pemilihan umum tersebut adalah masyarakat yang telah lolos seleksi, baik untuk jabatan Komisioner, PPK (Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

Terkait tugas dan wewenangnya sebagai lembaga penyelenggara pemilukada, PPK bebas dari segala pengaruh. Sehingga dalam setiap penyelenggaraan pemilu, PPK memiliki kredibilitas yang terpercaya dan beracuan pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dalam menyelenggarakan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas efisiensi dan efektivitas.

Dinamika pemilihan umum dipengaruhi oleh salah satu aspek penting yaitu eksistensi institusi penyelenggaraan pemilihan umum. Netralitas, integritas, kapasitas, dan profesionalisme PPK merupakan syarat penting bagi penyelenggaraan pemilihan umum karena konflik kepentingan akan sering dijumpai PPK dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Namun realita di lapangan, masih banyak terjadi berbagai persoalan baik persoalan teknis maupun administrasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Persoalan ini telah terjadi pada Pilkada yang pertama dan sampai sekarang pun juga masih sering terjadi. Hal ini bisa dilihat dari adanya keterlambatan dalam memberikan sosialisasi, jumlah pemilih yang tercantum pada DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan jumlah riil masyarakat yang memiliki hak pilih tidak sama, serta alat-alat dan infrastruktur yang pengadaannya juga sering terjadi keterlambatan. Permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada ternyata tidak hanya terjadi sebelum pelaksanaan saja, tetapi permasalahan paska Pilkada pun kerap terjadi, yakni keterbukaan hasil pemungutan suara. Terkait permasalahan tersebut, cara kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selalu dipantau oleh Komisi Pemilihan Umum di daerah.

Keterlibatan masyarakat dalam pesta demokrasi (Pemilu) merupakan implementasi penyelenggaraan kedaulatan. Tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat memahami dan mengikuti serta melibatkan diri dalam kegiatan pemerintahan. Sehingga apabila rakyat kurang memberikan apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan maka hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masih rendah yang umumnya direfleksikan dengan sikap tidak memilih dalam pelaksanaan pemilu. Dari permasalahan tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil judul tentang ***“Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat***

Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo)”.

B. Rumusan Masalah

Pokok-pokok masalah yang dapat dikemukakan sesuai latar belakang tersebut di atas antara lain:

1. Bagaimana peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur tahun 2018 dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur tahun 2018 dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat?

C. Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini antara lain penulis ingin mengetahui:

1. Upaya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur tahun 2018 dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat.
2. Faktor pendukung dan penghambat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur tahun 2018 dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis :

Manfaat penelitian ini antara lain untuk pengembangan ilmu pemerintahan.

2. Secara Praktis :

Sedangkan manfaat secara praktis adalah penelitian ini memberikan ilmu politik utamanya terkait dengan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam memotivasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilihan masyarakat pada Pemilihan Gubernur tahun 2018.

E. Penegasan Istilah

1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis suatu kedudukan (status). Seseorang dikatakan menjalankan suatu peran apabila telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2002: 243).

2. Partisipasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi diartikan sebagai peran serta atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan, dalam bentuk pengamatan aktif dan ikut serta dalam dalam kehidupan lapangan atau objek yang diamati. (KBBI, <http://kbbi.web.id/partisipasi;2017>)

3. Peran Panitia Pemilihan Kecamatan

Terlaksananya setiap tahapan pemilihan umum menjadi tanggung jawab sepenuhnya Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pemerintahan yang independen melalui Panitia Pemilihan Kecamatan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengajak masyarakat sadar hukum dan memberikan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah dengan memperbanyak sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilihan umum. Semua lapisan masyarakat harus mendapat sosialisasi tersebut, utamanya mereka yang mempunyai hak memilih maupun dipilih guna meningkatkan partisipasi pemilih.

F. Landasan Teori

1. Pengertian Peran

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Seseorang dikatakan telah menjalankan suatu peranan apabila orang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Keduanya saling bertentangan satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Peranan masing-masing orang berbeda-beda tergantung pada pola-pola pergaulan hidupnya. Sehingga dalam hal ini peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Menurut Soerjono Soekanto (2002: 268-269), fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses merupakan penekanan peranan yang utama.

Peranan merupakan suatu tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan hak dan kewajibannya dengan cara tertentu sesuai dengan status yang dimilikinya Abdulsyani (2007: 94). Jika pelaku peranan telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat, maka. Kecenderungan akan adanya suatu

harapan-harapan baru muncul apabila status tertentu dalam kehidupan masyarakat melekat pada diri seseorang.

Peranan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Aspek dinamis dari kedudukan
- 2) Perangkat hak-hak dan kewajiban
- 3) Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- 4) Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

(Soerjono Soekanto, 2002: 441)

Hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat disebut dengan hubungan sosial. Sedangkan yang mengatur peranan tersebut adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu peranan seseorang yang terkait dengan posisi atau tempatnya dalam masyarakat, peranan yang terkait dengan suatu konsep mengenai hal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, serta tindakan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002: 246).

Sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban inilah yang disebut dengan peran. Lingkungan sangat mengharapkan masyarakat melakukan peran sesuai kedudukannya karena hal tersebut dapat memberikan pengaruh pada lingkungan tersebut.

2. Pengertian Partisipasi

Menurut Syafi'i (2002), yang dimaksud dengan partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan

kondisi organisasinya dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi dan bertanggung jawab bersama-sama.

Dari pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa faktor terpenting dalam setiap sikap seseorang atau individu dalam suatu organisasi baik itu organisasi pemerintahan atau organisasi lainnya disebut dengan partisipasi. Partisipasi ini dapat memotivasi seseorang untuk meraih tujuan dari organisasinya sebagai tujuan bersama dan merupakan pemikiran dari beberapa individu bagi kemajuan organisasi yang menaunginya, karena perlu mempunyai tanggungjawab bersama dari setiap tujuan tersebut.

Selain itu Surbakti juga memberikan definisi partisipasi politik sebagai berikut:

“Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik dikarenakan keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.”

Menurut pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa salah aspek terpenting dalam penyelenggaraan demokrasi adalah partisipasi dikarenakan pelaksanaan demokrasi dapat menentukan pengambilan keputusan politik dan pelaksanaan oleh pemerintah serta. Hal ini juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat selanjutnya.

Nimmo (2010:162) mengemukakan ada empat tipe pemberian suara dalam pemilihan umum, yaitu:

1. Tipe rasional ini merupakan sikap berani seseorang dalam memutuskan pemberian suara. Orang yang rasional selalu dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada pilihan. Memilih pilihan-pilihan tersebut secara sadar. Menyusun alternatif-alternatif dengan cara transitif, memprioritaskan alternatif yang peringkat preferensinya paling tinggi, dan selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif yang sama. Pemberi suara rasional berminat secara aktif terhadap politik.
2. Tipe reaktif merupakan tipe yang memiliki ketertarikan emosional dengan partai politik. Ikatan partai sebagai identifikasi partai, yakni sebagai sumber utama aksi-diri dan pemberi suara. Mengenali partai meningkatkan citra yang lebih menguntungkan tentang pengalaman, kemampuan, atribut personal partai. Semakin kuat ikatan partai itu, semakin dibesar-besarkan pula persepsinya.
3. Tipe responsif adalah pemberi suara yang mudah berubah seiring berjalannya waktu, peristiwa politik dan kondisi-kondisi sesaat. Hubungan itu ternyata tidak memengaruhi perilakunya dalam pemberian suara walaupun memiliki kesetiaan kepada partai. Hubungan dengan partai lebih rasional ketimbang emosional. Faktor-faktor tertentu jangka pendek yang penting dalam pemilihan umum turut mempengaruhi pemberi suara tipe responsive dibanding oleh kesetiaan jangka panjang kepada kelompok/partai.

4. Tipe aktif adalah pemberi suara yang terlibat aktif dalam menginterpretasikan peristiwa, isu, partai, dan personalitas, dengan menetapkan dan menyusun maupun menerima, serangkaian pilihan yang diberikan. Pemberi suara yang aktif menginterpretasikan melalui serangkaian kampanye yang dilakukan, kemudian merumuskan citra tentang apa yang diperhitungkan oleh mereka. Dengan demikian tindakan komunikasi dilakukan dalam bentuk memberikan suara.

G. Definisi Operasional

1) Indikator Peran PPK

Peran PPK yakni untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan dibentuk PPK. PPK berkedudukan di ibukota Kecamatan. Maksimal 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dilaksanakan, KPU Kabupaten/Kota telah membentuk PPK dan masa kerja berakhir 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Anggota PPK mempunyai hak keuangan yang dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan tugasnya. Banyaknya anggota PPK adalah 5 (lima) orang yang telah lolos seleksi sesuai Undang-Undang dengan komposisi keanggotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) memperhatikan keterwakilan perempuan. KPU Kabupaten/Kota berhak mengangkat dan memberhentikan anggota PPK.

2) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada dimulai dari tahap awal Pilkada, sosialisasi tentang Pilkada, pelaksanaan Pilkada, hingga tahap pemungutan suara

H. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Tingkat keakuratan suatu penelitian ditentukan salah satunya oleh ketepatan penggunaan metode. Oleh karena itu, supaya diperoleh hasil penelitian yang tepat sasaran, maka dalam penelitian diperlukan suatu metode penelitian.

Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini. Jenis penelitian ini cenderung menggunakan analisis serta lebih mengutamakan pada proses dan makna dengan tujuan untuk dapat lebih memahami suatu permasalahan yang sedang dikaji serta memperoleh lebih banyak informasi yang berupa kata maupun gambar-gambar dibandingkan dengan informasi yang berupa angka.

Objek pada penelitian ini adalah pemilih atau penduduk Desa Turi, Kecamatan Jetis pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018.

2) Informan Penelitian

Informan atau sumber data penelitian adalah pemberi informasi dalam penelitian. Memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas dan benar-benar memahami permasalahan dalam penelitian ini adalah syarat utama dalam pemilihan informan.

Informan dalam penelitian sekaligus merupakan tim penelitian meskipun sifatnya formal. Pentingnya informan bagi peneliti adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang peran PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Tahun 2018.

Dalam penelitian ini ada 8 orang yakni:

- a. Arif Rahman H sebagai Ketua PPK Kecamatan Jetis
 - b. Hari Bahrul Ulum sebagai Anggota PPK Kecamatan Jetis Divisi Sosialisasi
 - c. Veri Setiawan sebagai Anggota PPK Kecamatan Jetis Divisi Data
 - d. M. Zaenuriyanto sebagai Anggota PPK Kecamatan Jetis Divisi Logistik
 - e. Muhammad Kuzaeni sebagai Anggota PPK Kecamatan Jetis Divisi Hukum
 - f. Sonya M dari Pemilih atau Masyarakat Desa Turi Kecamatan Jetis
 - g. Naim Rofiqi dari Pemilih atau Masyarakat Desa Turi Kecamatan Jetis
 - h. Usman dari Pemilih atau Masyarakat Desa Turi Kecamatan Jetis
- 3) Teknik Penentuan Informan

Teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam menentukan informan, ada kriteria yang harus dipenuhi oleh calon informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang benar-benar akurat. Kriteria informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Informan telah memiliki hak pilih
- b. Informan adalah penduduk wilayah Kecamatan Jetis yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
- c. Informan bersedia diwawancarai

d. Informan menyampaikan informasi apa adanya sesuai dengan kenyataan di masyarakat

4) Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan dan pendokumentasian gejala-gejala yang diteliti secara runtut, serta dapat dipantau kredibilitasnya dan keabsahan kebenarannya.

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik tanya jawab antara peneliti dengan informan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan sesuai permasalahan penelitian untuk mendapatkan informasi guna penyelesaian permasalahan penelitian yang ada dalam penelitian ini.

c) Dokumentasi

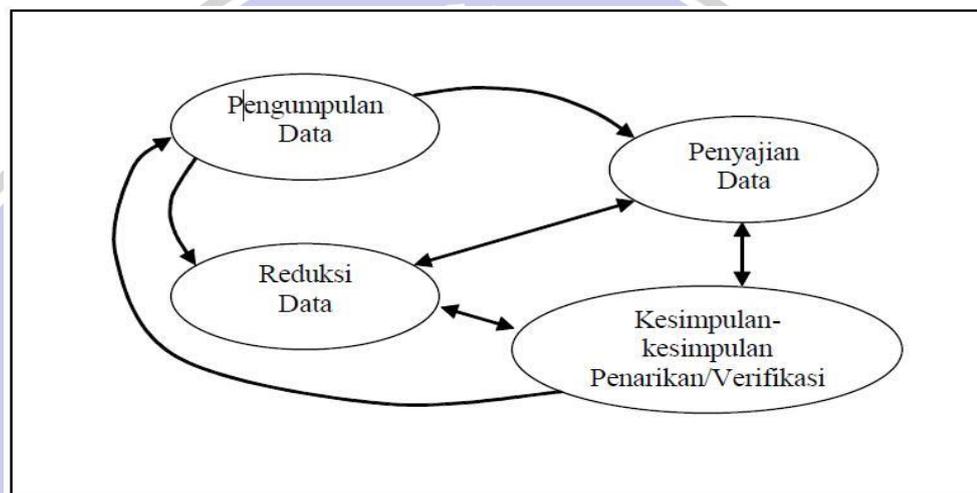
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dikelola secara runtut sehingga menghasilkan satu dokumen yang dimanfaatkan sebagai suatu bukti informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5) Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik *deskriptif kualitatif* yang menggunakan model *interaktif*. Dimana metode deskriptif merupakan metode untuk mencari solusi atau jawaban dari permasalahan yang diteliti dengan cara menguraikan kondisi objek penelitian,

sebagaimana adanya sesuai kondisi yang ada sekarang (Hadari Nawawi, 2003:26).

Dalam bukunya Sugiyono (2009: 337), Miles dan Huberman menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis kegiatan analisis dalam pandangan model *interaktif*, yaitu reduksi, dan penyajian data, serta pembuatan kesimpulan yang kemudian dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Miles dan Huberman

Gambar 1. Model Interaktif

Data yang diperoleh dalam penelitian bersumber dari hasil tanya jawab dengan responden yang telah ditetapkan oleh peneliti yakni dari PPK Kecamatan Jetis dan masyarakat Desa Turi Kecamatan Jetis yang telah memiliki hak pilih karena dianggap bersentuhan secara langsung dan ikut merasakan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal ini sesuai dengan skema di atas.

Data yang telah diperoleh dari informan kemudian diseleksi guna memperoleh hasil penelitian yang akurat dan sesuai dengan pertanyaan

yang disampaikan dalam wawancara. Untuk selanjutnya, dilakukan pengelompokan hasil jawaban dan disajikan berupa tabel yang kemudian akan diberi pemahaman secara objektif dan sesuai dengan realita yang ditemukan.

Tiga kegiatan utama yang terjadi di dalam kegiatan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan suatu proses untuk memperoleh dan mengatur transkrip wawancara dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk memperdalam pemahaman tentang bahan-bahan tersebut secara keseluruhan dan untuk menyampaikan apa yang telah ditemukan. Seluruh catatan hasil wawancara maupun data dokumentasi serta observasi disusun secara sistematis dengan maksud sebagai upaya untuk memperdalam pemahaman terhadap makna dari masing-masing data yang diperoleh dan menyajikannya sebagai hasil temuan dalam penelitian.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari awal sampai akhir sebuah penelitian yang berorientasi kualitatif, yang terdiri atas proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan pentransformasian data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data yang dapat dilakukan pada awal penelitian misalnya penentuan ruang lingkup dan permasalahan penelitian, definisi operasional dari istilah-istilah yang digunakan dan

penentuan pendekatan dalam pengumpulan data. Sedangkan contoh reduksi data selama pengumpulan data dapat berupa pembuatan ringkasan, pengkodean, penelurusan tema, penentuan batas-batas permasalahan, dan pembuatan transkrip yaitu berupa satu lembar kertas yang berisi uraian singkat hasil penelaahan terhadap catatan lapangan, pemfokusan dan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian (Sugiyono, 2009:340).

Penyiapan dan pengolahan data merupakan pusat perhatian reduksi data, sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan. Untuk itu kegiatan penajaman, pengelompokkan, pengarahannya, penghilangan yang tidak diperlukan, dan pengelolaan data sangat dibutuhkan.

b. Penyajian data

Untuk memudahkan peneliti dalam memahami keseluruhan data merupakan tujuan dari penyajian data. Sehingga dengan penyajian ini dapat membantu dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk menganalisis data serta memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih detail dengan harapan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas.

c. Penarikan kesimpulan

Tindak lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data adalah kegiatan penarikan kesimpulan. Pada dasarnya data yang sudah melalui proses reduksi dan disajikan secara runtut telah memberikan gambaran pada kegiatan penyimpulan data. Peneliti harus berusaha untuk mampu memahami makna data yang diperoleh,

mendokumentasikan keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi dari awal pengumpulan data. Kesimpulan yang diperoleh tahap demi tahap akan semakin jelas sehingga pembahasan yang dilakukan akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini.

